

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kondisi manusia telanjang Afrika sebagai korban fenomena arab spring. Studi ini akan menggali lebih dalam mengenai fenomena arab spring yang berdampak pada kejahatan transnasional berupa *Human Trafficking*. Penelitian ini akan ditelaah menggunakan pandangan *Homo Sacer* yang dicetuskan oleh Giorgio Agamben dan kekerasan menurut Johan Galtung.

Musim Semi Arab atau yang dikenal dalam bahasa politik kancan internasional pada tahun 2011 yaitu *The Arab Spring* merujuk pada istilah tumbangnya rezim pemerintah otoriter dunia arab secara bersamaan mulai dari negara Tunisia yang menggulingkan rezim Zein Al-Abidin Ben Ali, Mesir yang menggulingkan rezim Hosni Mubarak kemudian dilanjutkan dengan Libya yang berhasil menggulingkan rezim Muammar Al – Gaddafi, Yaman, Bahrain, dan Suriah. *The Arab Spring* memiliki sebuah harapan untuk menjadikan hidup ke depannya lebih baik yang demokratis di negara Timur Tengah. Namun, Harapan tersebut berubah menjadi tampilan yang lebih seram. Fenomena *Arab Spring* telah merenggut ratusan nyawa dan hingga saat ini masih terus berlanjut (ABM 2013, 125).

Dalam Musim Semi Arab, para demonstran menuntut hak politik yang lebih besar, kesetaraan ekonomi, dan akuntabilitas pemerintah sering kali menghadapi

tindakan kekerasan oleh pasukan keamanan negaranya. Protest prodemokrasi ini menyebar secara cepat melalui media sosial. Tetapi meskipun mereka tampaknya siap untuk menegakkan kepemimpinan demokratis dan meredakan penindasan pemerintah, pemberontakan tersebut juga menyebabkan konflik bersenjata di beberapa negara, termasuk perang saudara di Suriah, Irak, Libya, dan Yaman.

Semua berawal dari negara Tunisia memiliki pejabat yang tidak memandang hak kewarganegaraannya, Mohamed Bouazizi merupakan seorang pedagang kaki lima yang mengalami penyiksaan oleh kelompok polisi Tunisia. Penyiksaan itu terjadi dalam berbagai bentuk. Sebagian besar, itu adalah jenis tirani birokrasi kecil-kecilan yang sangat dikenal banyak orang di wilayah itu. Polisi akan menyita timbangan dan hasil panennya, atau mendendanya karena menjalankan kios tanpa izin. Mohamed Bouazizi kemudian membakar dirinya di depan kantor pemerintahan sebagai bentuk protes untuk mengakhiri rezim otoritas Ben Ali.

Pada awalnya itu hanya bentuk dendam pribadi kemudian terjadi pemberontakan yang berlangsung cepat dan dahsyat. Dari Sidi Bouzid, pemberontakan menyebar ke Kasserine, Thala, Menzel Bouzaïene. Warga Tunisia dari segala usia, kelas, dan profesi bergabung dalam revolusi tersebut. Mereka berdemonstrasi menentang korupsi pemerintah dan presiden Tunisia yang otokratis. Tak lama kemudian, demonstrasi anti pemerintah meletus di Bahrain, tempat para pengunjuk rasa menuntut pembebasan tahanan politik dan reformasi hak asasi manusia; Yordania; Kuwait, yang parlemennya dibubarkan sebagai respons terhadap tekanan publik; Libya, tempat tindakan keras pemerintah terhadap para pengunjuk rasa memicu perang saudara ; dan Yaman, tempat protes besar-besaran

memicu krisis politik dan memaksa presidennya untuk mundur. Demonstrasi yang sebagian besar berlangsung damai terhadap rezim yang berkuasa menyebabkan terjadinya peralihan kekuasaan yang cepat di Mesir dan Tunisia. Namun, di Libya, terjadi pemberontakan terhadap kekuasaan empat dekade Muammar al-Gaddafi menyebabkan perang saudara dan intervensi militer internasional.

Gaddafi percaya bahwa demokrasi perwakilan sebagai model pemerintahan tidak memadai dan dengan demikian ia membentuk Jamahariya yang diklaim Gaddafi sebagai sebuah sistem pemerintahan dan bentuk demokrasi tertinggi, di mana rakyat sendiri menjadi presiden. Dalam Jamahariya, Gaddafi berpendapat, massa memiliki lebih banyak kekuasaan daripada yang dapat mereka miliki di bawah demokrasi perwakilan atau demokrasi Barat. Sistem yang Gaddafi perkenalkan pada dasarnya kontradiktif, karena melihat bagaimana cara Gaddafi berkuasa dipertanyakan oleh banyak orang (Libyan Heritage House, n.d.). Sistem Jamahariyah, satu – satunya pemerintahan yang dikenal sebagian besar rakyat Libya, adalah kedok bagi pemerintahan otoriter dan telah membuat negara tersebut tetap miskin (Reuters, 2007).

Rakyat Libya yang telah lama menderita dipaksa menghadiri kongres-kongres rakyat yang tidak diberi kekuasaan, wewenang atau anggaran apapun, dengan pengetahuan bahwa siapa pun yang berbicara tanpa hak dan mengkritik rezim dapat dijebloskan ke penjara. Seperangkat hukum kejam diberlakukan atas nama menegakkan keamanan, yang selanjutnya melemahkan klaim kolonel sebagai pejuang kebebasan dari penindasan dan kediktatoran. Hukuman yang dijatuhkan meliputi hukuman kolektif, hukuman mati bagi yang menyebarkan teori yang

bertujuan untuk mengubah konstitusi, dan hukuman penjara seumur hidup bagi yang menyebarkan informasi yang mencoreng nama baik negara (BBC News, 2011).

Dalam pemilihan demokratis pertama Libya, sebagian besar pemilih memilih pemerintahan sekuler. Namun, transisi tersebut dirusak oleh persaingan antara partai-partai sekuler, islamis, dan independen ditambah dengan meningkatnya bentrokan di antara milisi baru (Rowan, 2019). Pelaksanaan transisi menuju demokrasi di Libya tidak berjalan mulus terutama dengan semakin meningkatnya konflik dan peredaran senjata yang terjadi di berbagai daerah. Konflik bersenjata yang terjadi di tengah transisi demokratisasi menunjukkan masalah lemahnya pemerintah sementara atau dikenal sebagai *National Transitional Council* (NTC) dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri di samping masih rendahnya peran masyarakat sipil dalam politik akibat warisan kediktatoran politik rezim selama kurang lebih 42 tahun (Kartini et al. 2016).

Pasca tewasnya Gaddafi, Dewan Transisi Nasional yang didukung PBB membentuk jalan demokratisasi dengan mengagendakan pelaksanaan pemilu dan pembentukan konstitusi di Libya. Konstitusi memang sangat dibutuhkan, melihat pada masa kekuasaan Gaddafi, konstitusi dibentuk dengan tujuan untuk mendukung kekuasaannya semata, sehingga peraturan yang muncul adalah larangan berdirinya partai politik, pemberangusan Gerakan oposisi dan media massa. Perbedaan pendapat diantara anggota NTC dalam perumusan konstitusi menghambat laju transisi terutama terkait pelaksanaan pemilu hingga otoritas Libya terpaksa menyepakati konstitusi sementara sampai terbentuknya keanggotaan Kongres

Nasional Libya atau disebut sebagai *General National Congress* (GNC). Pada tahun 2012, diselenggarakan pemilu bersejarah dalam politik Libya. Pemilu tersebut merupakan momentum penyerahan kekuasaan dari pemerintah Transisi (NTC) ke *General National Congress* (GNC) (Kartini et al. 2016). Dalam kondisi inilah, praktik kejahatan transnasional dalam wujud *human trafficking* semakin massif terjadi.

Human trafficking atau perdagangan manusia melibatkan pengguna penelitian kekerasan, penipuan, dan paksaan untuk memperoleh tenaga kerja dan tindakan seks komersial. Hal ini bisa terjadi di komunitas manapun dan korban bisa untuk segala usia, jenis kelamin, dan berbagai negara. Kegiatan eksploitasi ini membawa keuntungan bagi pihak ketiga. Jenis eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku berupa perbudakan hutang, pekerja anak, kerja paksa, pernikahan paksa, mengemis paksa, dan yang terakhir adalah pengangkatan organ. Ratusan pengungsi Afrika dibeli dan dijual di pasar budak yang berlokasi di Libya. Banyak dari mereka ditawan untuk tebusan atau dipaksa menjadi pelacur dan eksploitasi seksual untuk membayar para penculik dan penyelundup mereka. Pada akhirnya para korban dibunuh oleh penyelundupnya di padang pasir terbuka atau mati karena kehausan atau kecelakaan mobil di padang pasir Libya yang luas.

Para pengungsi dan migran sebagian besar berasal dari Ghana, Nigeria, Kamerun, Zambia, Senegal, Gambia dan Sudan. Mereka diselundupkan ke Libya oleh jaringan kriminal dengan janji mencapai pantai Eropa. Libya merupakan tujuan berbahaya bagi seseorang yang mencari perlindungan, migran, dan pengungsi. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan politik, lemahnya penegakan

hukum, dan kondisi perekonomian yang terancam membuat jaringan kriminal cepat berkembang. Para jaringan korban ini datang dengan kondisi putus asa dalam mencari kehidupan yang layak. Mereka dijebak dalam lingkaran kejahatan, eksploitasi, dan kekerasan.

Salah satu kota yang menjadi pusat penyelundupan bahan bakar dan perdagangan manusia adalah Zawiyah. International Red Cross and Red Crescent Movement yang sedang bertugas di tepi pantai Zawiyah menemukan puluhan kantong mayat. Sebuah kelompok bersenjata mencegah kapal-kapal migran berangkat dari Zawiyah. Kelompok-kelompok bersenjata menerima bayaran untuk menghentikan kapal-kapal tersebut meninggalkan Libya, dengan imbalan bantuan, hanggar pesawat terbang, dan uang dalam jumlah besar.

Dalam konteks perdagangan manusia yang terjadi di Libya, hal ini menunjukkan bahwa transisi pemerintahan dari kediktatoran Muammar al Gaddafi menjadi demokratis membuka ruang abu-abu bagi pelaku *human trafficking* yang memanfaatkan ketidakstabilan rezim politik untuk melakukan praktik perdagangan manusia. Korban *human trafficking* menjadi individu yang dilucuti hak-hak dasarnya dan hanya sebagai individu yang dikorbankan sebagaimana istilah *homo sacer* atau manusia telanjang dari Giorgio Agamben. Dari titik tolak masalah ini, peneliti menilai penting untuk mengkaji bagaimana korban *human trafficking* di Libya mengalami kondisi *homo sacer* dengan perlakuan *state of exception* dari aparaturnegara Libya.

1.2 Rumusan Masalah

Gejolak Arab Spring di Libya pada tahun 2011, yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan dan konflik bersenjata. Dalam situasi anarki tersebut, kelompok-kelompok bersenjata dan milisi merekrut serta memperbudak para migran Afrika Sub-Sahara, termasuk laki-laki dan perempuan, untuk dipekerjakan sebagai pekerja paksa, budak seks, dan bahkan tentara anak-anak. Laporan-laporan mengerikan tentang perlakuan tidak manusiawi, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap para migran ini telah memicu kecaman internasional dan menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan yang terjadi di Libya pasca Muammar al Gaddafi. Berdasarkan rumusan masalah ini, dirumuskan pertanyaan penelitian: Bagaimana korban *human trafficking* menjadi *homo sacer* dalam fenomena arab spring di Libya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana korban *human trafficking* menjadi *homo sacer* dalam fenomena arab spring di Libya. Penelitian ini juga akan mengungkapkan praktik-praktik kekerasan dan dehumanisasi yang dialami oleh korban perdagangan manusia di Libya, serta bagaimana praktik-praktik ini menghilangkan hak-hak dasar mereka sebagai manusia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan penulis, maka penelitian ini diharapkan dapat mengungkap mekanisme-mekanisme eksklusif yang digunakan untuk merampas hak-hak dasar korban, menjadikan mereka sebagai individu yang terpinggirkan dan tidak terlindungi.

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi kajian hubungan internasional khususnya dalam kajian postmodernisme, dalam mengkaji fenomena *Arab Spring* dan *human trafficking*. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memperkaya literatur akademis mengenai perspektif Agamben dalam mengkaji kasus *human trafficking* pada imigran Afrika sebagai suatu kajian baru dalam ilmu hubungan internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan program perlindungan yang lebih efektif bagi para migran, khususnya korban perdagangan manusia. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi tentang cara-cara untuk mencegah perdagangan manusia, memberikan bantuan kepada para korban, dan menuntut para pelaku. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai rujukan praktis untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang menggunakan pendekatan postmodernisme.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab. Dalam setiap Bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah/pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang korban *human trafficking* menjadi homo sacer dalam fenomena arab spring di Libya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan argumen utama serta metode yang menjelaskan tentang korban *human trafficking* menjadi homo sacer dalam fenomena arab spring di Libya.

BAB III FENOMENA ARAB SPRING DI LIBYA

Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan secara komprehensif mengenai dinamika politik domestik di Libya, arah dan karakteristik kebijakan politik luar negeri yang dijalankan oleh negara tersebut, serta tanggapan dan sikap pemerintah terhadap rezim Muammar Gaddafi. Selain itu, pembahasan juga akan mencakup Libya merespons gelombang perubahan sosial-politik yang dikenal sebagai Fenomena Arab Spring.

**BAB IV KEKERASAN DAN KONDISI HOMO SACER AFRIKA
DALAM FENOMENA ARAB SPRING**

Bagian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam sejarah dan evolusi perdagangan manusia (*human trafficking*) di kawasan Afrika, dengan penekanan khusus pada situasi di Libya. Analisis ini mencakup faktor-faktor struktural dan sistemik yang mendorong terjadinya perdagangan manusia terhadap migran asal Afrika, kegagalan institusional negara Libya dalam menangani permasalahan tersebut, serta dinamika kekerasan yang dialami oleh para korban. Selain itu, pembahasan akan menyoroiti kondisi para korban sebagai homo sacer dalam konteks fenomena Arab Spring, serta menelaah implikasi status quo homo sacer terhadap eksistensi dan pengakuan ontologis mereka sebagai subjek manusia.

BAB V

PENUTUP

Bab ini akan mendeskripsikan kesimpulan dan saran mengenai hasil temuan dari masalah penelitian yakni korban *human trafficking* menjadi homo sacer dalam fenomena Arab Spring di Libya.